

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Jateng Co

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan Interim

<http://jateng.co/bpk-mulai-lakukan-pemeriksaan-interim/>



PURBALINGGA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pemeriksaan interim atau audit pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan ini rutin dilakukan tiap tahun buat mengaudit pengelolaan rapikan keuangan pemerintah dalam tahun sebelumnya.

Pemeriksaan kali ini dihitung mulai lepas 2 – 21 Februari 2022 atau 20 hari. Pemeriksaan pula akan dilanjutkan terhadap bantuan partai politik selama 3 hari.

“Tujuan & sasaran pemeriksaan interim terdapat 3. Pertama, memantau tindak lanjut output pemeriksaan sebelumnya khususnya yang mempengaruhi opini, & alhamdulillah di sini tidak terdapat yang secara material signifikan berpengaruh ke opini, mungkin terdapat akan tetapi tidak material,” kata Dandung Budi Kuntardi selaku Pimpinan Tim Pemeriksa dari BPK, Kamis (3/2) waktu entry meeting dengan Bupati di Ruang Rapat Bupati.

Beliau melanjutkan, sasaran yang kedua yaitu melakukan risk assessment atau penilaian pengendalian interen. Penilaian ini akan dijadikan dasar buat melakukan pemeriksaan terinci atau dasar memilih nilai materialitas yang pula memilih opini.

“Yang ketiga, kita pula akan melakukan pengujian substantif terbatas atas akun. Beberapa akun telah kita lakukan substantif di interim meskipun sifatnya terbatas, antara lain dalam neraca & LRA (Laporan Realisasi Aturan),” katanya.

Buat neraca, antara lain dilakukan pemeriksaan kas, persediaan, & aset tetap. Sedangkan dalam akun LRA yakni dilakukan pemeriksaan dalam belanja modal, barang/jasa, belanja pegawai, hibah, bansos & Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Output pemeriksaan interim kami tidak melakukan laporan akan namun sebagai kesatuan dalam pemeriksaan terinci,” katanya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berharap pemeriksaan pendahuluan ini dapat berjalan baik & lancar. Bupati bareng para OPD menyatakan siap buat membantu menyediakan kelengkapan data dalam pemeriksaan.

“Sang karenanya tentu kami di jajaran pemerintahan mohon bimbingan dari BPK sebab kami di pemerintah wilayah punya komitmen supaya rapikan kelola keuangan pemerintah ke depan sebagai lebih baik & lebih baik lagi,” kata Bupati.

Beliau menambahkan, output pemeriksaan LKPD tahun 2020, Pemkab Purbalingga berhasil mendapatkan opini Lumrah Tanpa Pengecualian (WTP) buat ke-5 kalinya. Bupati berharap tahun ini opini tadi dapat terus dipertahankan.

“Tentunya kami berharap pemeriksaan yang rutin dilakukan BPK setiap tahunnya ini terdapat pembelajaran perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan di jajaran Pemkab Purbalingga supaya rapikan kelola keuangan di pemerintahan ini ke depan semakin baik,” ungkapnya.(Gn/Humas)